

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi merupakan sumber daya bisnis, sama dengan sumber daya bisnis lainnya seperti bahan baku, modal dan tenaga kerja, informasi sangat penting bagi perusahaan modern untuk bertahan hidup (Atyanto Mahatmyo, 2014:1). Informasi dapat diartikan sebagai data yang diolah menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, serta untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu keadaan (Elisabeth Yunaeti Anggraeni dan Rita Irviani, 2017:1).

Adapun istilah informasi yang diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang (Jeperson Hutahaeen, 2014:9). Senada dengan pernyataan sebelumnya, informasi dikatakan sebagai data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan (Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, 2015:4).

Informasi dikatakan bernilai ketika informasi tersebut dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan dan meningkatkan kemampuan untuk merencanakan dan menjadwalkan aktivitas (Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, 2018:4).

Laporan keuangan adalah salah satu bentuk dari informasi, di mana pemakainya akan menggunakan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan

baik itu untuk pihak intern maupun pihak ekstern (fitri mansura, 2017). Menyusun laporan keuangan merupakan sebuah kewajiban bagi setiap pemerintah daerah, hal ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara sesuai mekanisme yang ada. Laporan keuangan merupakan suatu cerminan yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah pemerintahan telah berjalan dengan baik atau tidak sehingga pemerintah diharuskan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk menilai kinerja pemerintah daerah (Mardiasmo, 2009)

Laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah Daerah diharuskan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Komponen laporan keuangan yang disampaikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Mahmudi, 2011).

Laporan keuangan pemerintah daerah bermanfaat memberikan informasi bagi stakeholder yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai serta pemakai mempercayai informasi tersebut. Informasi keuangan harus bermanfaat bagi pemakai sama seperti informasi tersebut harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2014)

Karakteristik yang harus dipenuhi agar informasi tersebut dapat dikatakan berguna diantaranya adalah informasi tersebut harus relevan, reliabel, lengkap,

tepat waktu, dapat dipahami, dapat diverifikasi serta dapat di akses (Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, 2018:5).

Dalam penyusunan laporan keuangan di perlukan sistem pengendalian internal yang baik. Sistem Pengendalian Internal adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak terbatas pada metode pengendalian yang dianut oleh bagian akuntansi dan keuangan, tetapi meliputi pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan staf pemeriksa internal (Bani Zamzami, 2013).

Sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, pemantauan pengendalian, informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, manajemen resiko, dan lingkungan etika. Komponen tersebut yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin atau manajemen perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan (Arens, 2017).

Penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian negara (Udiyanti, 2014). Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan sistem pengendalian internal adalah memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah (Sari, 2012)

Untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan suatu sistem akuntansi yang dapat mengakomodasi kebutuhan informasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan tersebut (BPKP, 2014:9). Sistem informasi akuntansi adalah seperangkat elemen atau komponen yang saling terkait

yang mengumpulkan (input), memanipulasi (memproses), menyimpan, dan menyebarluaskan (output) data dan informasi, dan memberikan reaksi korektif (mekanisme umpan balik) untuk memenuhi tujuan. Input adalah aktivitas mengumpulkan dan menangkap data mentah. Pemrosesan adalah mengubah atau mentransformasikan data menjadi keluaran yang bermanfaat, keluaran adalah hasil dari informasi yang berguna, biasanya dalam bentuk dokumen dan laporan, umpan balik adalah output yang digunakan untuk membuat perubahan pada input atau kegiatan pemrosesan (Ralph Stair dan George Reynolds, 2010:10).

Sistem informasi akuntansi juga harus memiliki kriteria yang berkualitas agar hasil dari sistem informasi akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Nur Zeina Maya Sari dan Djumhana Purwanegara, 2016). Sistem informasi akuntansi dapat dikatakan Integrasi dari semua unsur yang saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis dalam membentuk sistem informasi akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi yang berkualitas (Azhar Susanto, 2008:16).

Unsur-unsur yang terintegrasi tersebut disebut juga sebagai komponen sistem informasi akuntansi yang terdiri dari *Hardware*, *Software*, *Brainware*, jaringan komunikasi (Azhar Susanto, 2008:16). Sebuah sistem informasi yang berkualitas biasanya fleksibel, efisien, mudah diakses, dan tepat waktu (Ralph Stair dan George Reynolds, 2010:57).

Adapun permasalahan yang terjadi saat ini, terdapat masalah pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 yang diserahkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tetap mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (www.bandung.bpk.go.id dikutip tanggal 9 juli 2020).

Tabel 1.1
Hasil Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2011-2018

No	Tahun	Opini BPK
1	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	2015	Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
6	2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
7	2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
8	2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber : BPK IPHS II tahun 2018. BPK.RI

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa data hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum sebagaimana yang diharapkan. Terkait dengan kualitas informasi laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018. Menurut Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) cabang (KBB), Asep Dedi. Hal yang menjadi kendala Pemda KBB untuk meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), adalah masalah aset tetap yang belum tertib, penyaluran dan

pertanggungjawaban belanja. Maka, pencatatan dan inventarisasi yang masih belum sesuai. Hal tersebut mempengaruhi informasi yang terdapat didalam (LKPD) sehingga informasi yang diberikan tidak akurat dan relevan (Asep Dedi, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan terdapat fenomena yang terjadi pada SKPD kabupaten bandung barat yaitu masih ada permasalahan dalam sistem pengendalian intern yang belum optimal, hal tersebut dikarenakan oleh salah satu indikator sistem pengendalian intern yaitu informasi dan komunikasi yang belum optimal, faktor inilah yang menyebabkan informasi pada laporan keuangan menjadi tidak relevan dan tidak berkualitas.

Peran Sistem Pengendalian Internal adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan negara. Menilik kembali tujuan awal dari Sistem Pengendalian Internal yang salah satunya adalah memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan laporan keuangan, sistem pengendalian internal memiliki dua tujuan dasar yang paling utama yaitu berupa penguatan kualitas akuntabilitas negara dan bagian utama dari reformasi birokrasi. Salah satu indikator yang menilai kualitas laporan keuangan dapat tercermin dari opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah (Mardiasmo, 2010).

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada SKPD Kabupaten Bandung Barat terdapat fenomena yang terjadi yaitu masih ada permasalahan dalam sistem informasi akuntansi, sistem informasi yang digunakan belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan karena masih sering terjadi kesalahan dalam penyimpanan data, sehingga informasi sensitif mengenai

perusahaan bisa saja bocor karena sistem keamanan yang belum optimal. Faktor inilah berdampak pada informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang menjadi tidak relevan.

Selain itu terdapat fenomena sistem informasi akuntansi terkait dengan kecepatan waktu respon yang lemah. Seperti yang dilansir pada tanggal 17 Desember 2018 dimana Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalsel Tornada Syaifullah, menyatakan bahwa terkait aplikasi Siskeudes dan Sistem informasi lainnya belum sepenuhnya memadai masih harus dilakukan evaluasi serta pengujian terhadap ketepatan waktu laporan atas permintaan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi yang digunakan (Didik trio,2018).

Dari fenomena yang terjadi diatas dapat diketahui bahwa kualitas informasi dikatakan rendah, salah satu faktor penentu yang berpengaruh dalam menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas adalah sistem informasi akuntansi yang berkualitas juga (Rapina, 2014). Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Afrianti 2011).

Berkaitan dengan fenomena-fenomena tersebut, terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sally Paulina Sandanafu dan Mis Fertyno Situmeang pada jurnal yang berjudul “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah” Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan

keuangan pemerintah daerah Provinsi Maluku. Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Maluku. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Maluku. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Maluku (Sally, 2018)

Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendra Wansya¹, Darwanis, Usman Bakar, menunjukkan hasil pengujian secara parsial, berdasarkan hasil tersebut terbukti bahwa terdapat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis keempat yang telah dirumuskan yaitu kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD (Hendra, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Ida, Nyoman dan Ni Kadek pada jurnal yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah” dengan hasil penelitian di ketahui bahwa, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah akan meningkat. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara bersama sama berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas, yang berarti bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka akuntabilitas pemerintahan akan meningkat (Ida, 2014).

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas kualitas laporan keuangan. Atas pertimbangan inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul tugas akhir ***“Pengaruh sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah (Survey Pada SKPD Kabupaten Bandung Barat)”***.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pencatatan belum sesuai
2. Informasi pelaporan keuangan tidak relevan
3. Informasi dan Komunikasi belum optimal
4. Penyimpanan data belum optimal

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah
2. Seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan diteliti dan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Untuk memecahkan masalah sebagaimana yang ada pada fenomena yang telah dijelaskan diatas mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan pembaca mendapatkan informasi yang berguna sebagai bahan masukan dalam mengadakan perbaikan mengenai kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah dan sebagai referensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.